

IT GOVERNANCE dan INOVASI DIGITAL

Pilar Modernisasi Organisasi



ARUM PUSPITA

Transformasi digital telah menjadi sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan era disrupsi teknologi. Organisasi dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi mutakhir, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dalam hal tata kelola Teknologi Informasi (TI). Buku ini mengupas secara mendalam bagaimana IT Governance dapat menjadi pilar utama dalam proses modernisasi organisasi, menjembatani antara strategi bisnis dan pengelolaan sistem informasi yang efektif.

Buku ini membahas konsep-konsep fundamental dalam tata kelola TI seperti perbedaan antara IT Governance dan IT Management, serta pentingnya peran kebijakan, struktur, dan proses dalam mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan teknologi di seluruh lini organisasi. Dengan menggunakan kerangka kerja internasional seperti COBIT, ITIL, dan ISO/IEC 38500, pembaca dibimbing untuk memahami standar praktik terbaik dalam pengelolaan TI yang selaras dengan tujuan organisasi.

Selain membahas kerangka teoretis, buku ini juga dilengkapi dengan kajian praktis dan studi kasus dari berbagai sektor yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat mengimplementasikan strategi digital secara efektif. Fokus diberikan pada manajemen risiko, pengendalian akses informasi, penjaminan kualitas sistem, dan integrasi TI dalam pengambilan keputusan strategis. Penulis juga menekankan peran penting Chief Information Officer (CIO) dalam menyelaraskan kebutuhan teknologi dan bisnis.

Tidak hanya berhenti pada aspek struktural dan teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi. Budaya yang kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis data menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia yang melek teknologi juga menjadi fokus pembahasan yang tak terpisahkan.

Buku ini merupakan referensi komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi TI, serta pemimpin organisasi yang ingin memahami peran strategis tata kelola TI dalam era digital. Dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan aplikatif, buku ini tidak hanya menambah wawasan pembaca, tetapi juga memberikan panduan nyata dalam merancang strategi transformasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.



LECTURA
Literasi Digital Masa Kini

IT Governance dan Inovasi Digital

Pilar Modernisasi Organisasi

Arum Puspita



2025

IT Governance dan Inovasi Digital:Pilar Modernisasi Organisasi

Copyright© 2025

QRCBN: 62-4321-5647-514

Penulis: Arum Puspita

Editor: Arum Puspita

Cetakan Pertama, 2025

Diterbitkan pertama kali oleh:



Jl. Joyo Pranoto Dalam No. 601D, Kelurahan Merjosari,
Lowokwaru, Kota Malang

Email: aparumpuspita@gmail.com

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dengan cara apapun; tanpa izin tertulis dari
Penerbit.

Kata Pengantar

Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan strategis bagi setiap organisasi yang ingin bertahan dan unggul di tengah persaingan global. Di era di mana teknologi berkembang secara eksponensial, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi baru, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran buku “IT Governance dan Inovasi Digital: Pilar Modernisasi Organisasi” ini patut diapresiasi. Buku ini menjawab kebutuhan mendesak akan literatur yang tidak hanya menjelaskan konsep IT Governance secara teoritis, tetapi juga memetakan keterkaitannya secara langsung dengan strategi inovasi digital, peran organisasi, dan dinamika manajerial di era disruptif. Penulis menyuguhkan kajian yang mendalam namun tetap komunikatif, menjadikan buku ini relevan untuk kalangan akademik maupun praktisi.

Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak, saya menyadari bahwa keberhasilan penerapan teknologi dalam organisasi sangat ditentukan oleh tiga aspek utama: tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, dan keselarasan antara strategi bisnis dan TI. Buku ini secara komprehensif menguraikan prinsip-prinsip tersebut melalui pembahasan kerangka kerja seperti COBIT, ITIL, dan ISO/IEC 38500, yang kemudian diintegrasikan dengan studi kasus dan analisis peran pemimpin digital seperti Chief Information Officer (CIO).

Yang menarik dari buku ini bukan hanya kelengkapan substansinya, tetapi juga keberhasilannya dalam menyampaikan pentingnya aspek budaya organisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan keberanian untuk berubah sebagai inti dari inovasi digital. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk memahami tata kelola TI sebagai kerangka kerja, tetapi juga sebagai sebuah mindset yang perlu diinternalisasi dalam seluruh jenjang organisasi.

Saya meyakini bahwa buku ini dapat menjadi referensi penting dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengendalian strategi digital dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Bagi mahasiswa dan akademisi, buku ini menyediakan fondasi teoretis yang kokoh; bagi praktisi, ia menawarkan panduan aplikatif yang dapat langsung diimplementasikan. Bagi saya pribadi, buku ini merupakan kontribusi intelektual yang memiliki nilai strategis dan jangka panjang.

Saya mengucapkan selamat kepada penulis atas karya yang bermutu ini, dan berharap buku ini dapat memberi inspirasi, membuka wawasan, serta membentuk praktik tata kelola TI yang lebih adaptif dan inovatif di berbagai lini organisasi.

Malang, 1 Juni 2025

Pakar RPL,

Syahiduz Zaman

Prakata

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari refleksi panjang atas dinamika dunia Teknologi Informasi (TI) yang semakin kompleks, serta kebutuhan mendesak akan literatur yang menggabungkan antara pendekatan teoritis dan implementatif dalam konteks tata kelola TI dan transformasi digital.

Lahirnya buku ini didorong oleh realitas bahwa banyak organisasi di Indonesia masih menjalani transformasi digital secara reaktif, tanpa perencanaan strategis yang matang atau fondasi tata kelola TI yang kuat. Tidak sedikit pula organisasi yang hanya berfokus pada pembelian teknologi atau sistem baru, namun mengabaikan integrasi teknologi tersebut ke dalam struktur tata kelola, proses kerja, dan budaya organisasi. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus latar belakang penulisan buku ini.

Penulis berupaya menyusun buku ini dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep penting dalam IT Governance seperti COBIT, ITIL, dan ISO/IEC 38500 dengan berbagai perspektif strategis mengenai inovasi digital. Selain itu, buku ini memperkenalkan pembaca pada peran penting Chief Information Officer (CIO), manajemen risiko TI, serta integrasi strategi TI dengan tujuan bisnis organisasi.

Buku ini ditujukan bagi berbagai kalangan—baik akademisi, mahasiswa, praktisi TI, maupun pimpinan organisasi—yang tengah berupaya membangun pemahaman dan kemampuan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi tata kelola TI yang selaras dengan kebutuhan transformasi digital. Penulis berharap bahwa buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga menjadi panduan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di lingkungan kerja dan organisasi masing-masing.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para dosen, rekan sejawat, mahasiswa, dan praktisi yang telah banyak memberikan inspirasi, masukan, dan semangat selama proses penulisan buku ini berlangsung. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata

bagi pengembangan dunia teknologi informasi di Indonesia, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya tata kelola TI sebagai landasan utama dalam menghadapi disrupsi digital yang terus berkembang.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan mampu menjadi referensi yang inspiratif dan aplikatif bagi para pembaca di era digital yang penuh tantangan dan peluang ini.

Malang, 1 Juni 2025

Penulis,

Arum Puspita

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Prawacana	v
DAFTAR ISI	vii
IT Governance, Fondasi Utama di Balik Kesuksesan Digital.....	1
Optimamalisasi IT di Dunia Pendidikan: Implementasi ITIL untuk Layanan yang Lebih Efektif	5
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Audit TI: Mengapa COBIT 4.1 Jadi Solusi Terbaik?	9
Benarkah Transparansi di ASEAN Hanya Ilusi? Fakta Mengejutkan di Balik Tata Kelola Perusahaan	13
Benarkah Perusahaan Digital Aman? Fakta Mengejutkan Tentang Keamanan Siber!	17
Tata Kelola TI: Revolusi atau Sekedar Birokrasi Digital?	21
Tata Kelola TI Pemerintah: Mewah di Atas Kerta, Mandek di Lapangan?	23
Kerangka Tata Kelola TI: Struktur Ideal yang Gagal di Realita?	25
Kenaikan <i>Maturity</i> Cuma 0.05 Poin? Serius Kita Mau Rayakan Ini?... <td>27</td>	27
COBIT 5 di Kampus: Tata Kelola atau Sekedar Gaya-Gayaan?	29
Agile untuk COBIT? Lincah atau Lari dari Masalah?	33
TI Hebat, Bisnis Hebat? Nanti Dulu!	35
Mau COBIT, ITIL, ISO? Kalau Anggaran Tak Ada, Semua Percuma.....	39
Framework Keamanan Siber Sudah Usang? Ini Bukti	43
COBIT 5 di Kampus: Mimpi Indah Tata Kelola IT yang Terlalu Muluk?	45
Green IT: Sekedar Label atau Jalan Menuju Masa Depan?	47
Riwayat Hidup Penulis	49

IT Governance, Fondasi Utama di Balik Kesuksesan Digital

27 Februari 2025, 22:36



Di tengah pesatnya transformasi digital, teknologi informasi (TI) bukan sekadar alat pendukung bisnis, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan. Namun, pertumbuhan TI yang cepat juga membawa tantangan besar, seperti ancaman keamanan siber, ketidaksesuaian regulasi, serta pengelolaan data yang buruk.

Sebuah penelitian terbaru berjudul "*A Reference Model for Information Quality in an IT Governance Context*" oleh Steuperaert, Poels, dan Devos (2024) menyoroti peran kualitas informasi dalam sistem *IT Governance* sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Dalam penelitian ini, para ahli mengembangkan *Information Quality Reference Model* (IQRM), sebuah *framework* yang membantu organisasi menilai seberapa efektif informasi dalam mendukung tata kelola TI yang optimal.

Mengapa IT Governance Begitu Penting?

- *IT Governance* bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi lebih dari itu:
- Mencegah Risiko Keamanan: Sistem TI yang tidak terkelola dengan baik rentan terhadap peretasan dan kebocoran data.

- Meningkatkan Efisiensi Operasional: Tata kelola TI yang baik memastikan pemanfaatan teknologi yang optimal tanpa pemborosan sumber daya.
- Mendukung Keputusan Berbasis Data: Informasi yang berkualitas membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis.
- Menjaga Kepatuhan Regulasi: Dengan *IT Governance*, perusahaan dapat mematuhi standar internasional seperti GDPR dan ISO 27001.

Mendorong Inovasi Teknologi: Organisasi yang memiliki tata kelola TI yang baik lebih siap mengadopsi teknologi baru secara berkelanjutan.

Studi: Meningkatkan Kualitas Informasi dalam *IT Governance*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas informasi yang buruk dapat menghambat efektivitas tata kelola TI, sehingga menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan dan peningkatan risiko operasional. Dengan IQRM, organisasi dapat mengevaluasi informasi berdasarkan lima aspek utama:

- ***Intrinsic Quality***: Keakuratan dan kredibilitas informasi.
- ***Contextual Quality***: Relevansi dan kegunaan informasi.
- ***Representation Quality***: Cara penyajian data agar mudah dipahami.
- ***Security Quality***: Keamanan akses dan proteksi data.
- ***Time-related Quality***: Ketepatan waktu dalam penyajian informasi.

Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola informasi dan mengoptimalkan strategi pengelolaan data mereka.

***IT Governance* sebagai Kunci Keberlanjutan Bisnis**

Bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif di era digital, menguasai *IT Governance* bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Mengimplementasikan tata kelola TI yang baik berarti mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan bisnis.

Bagi para profesional TI, pemahaman tentang *IT Governance* juga menjadi keterampilan penting yang dapat meningkatkan prospek karier. Sertifikasi seperti COBIT, ITIL, dan CISA menjadi bukti kompetensi dalam mengelola TI secara strategis.

Jadi, sudahkah organisasi Anda memiliki *IT Governance* yang kuat? Jika belum, sekaranglah waktunya untuk bertindak.

Referensi

Steuperaert, D., Poels, G., & Devos, J. (2024). A Reference Model for Information Quality in an IT Governance Context. *Business Informatics and Operations Management Department, Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, Belgium*. <https://orcid.org/0000-0002-7009-4183>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67c0868aed641573105b8292/it-governance-fondasi-utama-di-balik-kesuksesan-digital>

Optimamalisasi IT di Dunia Pendidikan: Implementasi ITIL untuk Layanan yang Lebih Efektif

6 Maret 2025, 13:37



Di era digital, pemanfaatan TI dalam dunia pendidikan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Institusi pendidikan di Indonesia semakin bergantung pada sistem IT untuk mendukung aktivitas akademik, administrasi, dan layanan mahasiswa. Namun, tidak semua institusi memiliki tata kelola IT yang efektif. Di sinilah kerangka kerja *IT Infrastructure Library* (ITIL) V3 berperan penting dalam mengoptimalkan manajemen layanan IT, terutama dalam menangani insiden yang dapat mengganggu operasional.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam *International Journal of Computer Science and Information Technology* mengungkap bagaimana berbagai institusi pendidikan di Indonesia menerapkan ITIL dalam domain *Service Operation* untuk meningkatkan efektivitas layanan IT mereka. Studi ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis penerapan manajemen insiden di berbagai institusi pendidikan.

Variasi Tingkat Kematangan IT di Berbagai Institusi

Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa tingkat kematangan manajemen insiden dalam ITSM (*IT Service Management*) berbeda-beda antara satu institusi dengan yang lain. Politeknik Negeri Sriwijaya dan Universitas Terbuka Palembang misalnya, telah mencapai tingkat kematangan yang cukup tinggi dalam tata kelola IT mereka. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya standarisasi prosedur dan pelatihan staf IT.

Sebaliknya, beberapa institusi seperti SMK Negeri 8 Palembang dan Universitas Multimedia Nusantara masih berada pada tahap awal dalam penerapan ITIL. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dokumentasi dan integrasi proses, yang menyebabkan sistem layanan IT belum berjalan secara optimal.

Manfaat Implementasi ITIL dalam Pendidikan

Penerapan ITIL dalam institusi pendidikan memberikan beberapa manfaat signifikan, di antaranya:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan IT. Dengan tata kelola insiden yang baik, gangguan layanan IT dapat diminimalkan, sehingga tidak menghambat proses pembelajaran.
2. Meningkatkan Kepuasan Pengguna. Mahasiswa dan staf akan mendapatkan pengalaman layanan IT yang lebih andal dan responsif.
3. Efisiensi Waktu dan Biaya. Dengan proses yang lebih terstandarisasi, institusi dapat mengurangi pekerjaan yang berulang dan lebih cepat dalam menangani permasalahan IT.
4. Mempercepat Integrasi Teknologi Baru. ITIL membantu institusi dalam mengadopsi teknologi pendidikan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara maksimal, diperlukan komitmen institusi dalam meningkatkan pelatihan staf IT, mengoptimalkan infrastruktur teknologi, serta terus melakukan evaluasi terhadap implementasi ITIL.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun ITIL terbukti memberikan manfaat besar dalam pengelolaan layanan IT di institusi pendidikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- Kurangnya Dokumentasi dan Pelatihan. Banyak institusi belum memiliki dokumentasi yang baik terkait manajemen insiden, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
- Ketergantungan pada Teknologi Lama. Beberapa sekolah dan universitas masih menggunakan sistem yang usang, yang tidak kompatibel dengan prinsip ITIL modern.
- Proses yang Belum Terintegrasi. Banyak institusi belum memiliki sistem yang terhubung secara efisien, sehingga membuat penanganan insiden menjadi lebih lambat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola IT yang baik dalam institusi pendidikan. ITIL V3 menjadi solusi yang dapat membantu mengoptimalkan operasional layanan IT di berbagai institusi pendidikan. Sebagai langkah ke depan, institusi pendidikan di Indonesia diharapkan lebih serius dalam menerapkan dan mengembangkan *framework* ITIL agar dapat menghadirkan layanan IT yang lebih andal dan efisien. Dengan begitu, transformasi digital dalam dunia pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.

Referensi

Cintya Chen, Farrel Alifah Raihan, Salim Ariantou, & Ade Maulana. (2025). Implementation of IT Governance Using ITIL Domain Service Operation in the Education Sector in Indonesia. *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJJISIT)*, 1(2), 62-72.
<https://doi.org/10.55123/ijjisit.v1i2.14>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67c942a7ed64153ca1606922/optimamalisasi-it-di-dunia-pendidikan-implementasi-itil-untuk-layanan-yang-lebih-efektif>

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Audit TI: Mengapa COBIT 4.1 Jadi Solusi Terbaik?

7 Maret 2025, 19:55



Di era digital saat ini, tata kelola TI menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam melakukan audit tata kelola TI adalah kerangka kerja COBIT 4.1. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi COBIT 4.1 tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola TI secara lebih efektif tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan.

Mengapa Audit TI Itu Penting?

Audit TI sering kali dianggap sebagai prosedur administratif belaka. Namun, kenyataannya, audit TI adalah alat strategis yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan selaras dengan harapan pelanggan.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, ditemukan bahwa audit TI menggunakan COBIT 4.1 berfokus pada evaluasi proses utama dalam

tata kelola TI, yakni *Manage Quality (PO8)* dan *Manage Project (PO10)*. Kedua proses ini memainkan peran krusial dalam memastikan kualitas produk dan kelancaran proyek-proyek TI.

COBIT 4.1: Kerangka Kerja untuk Tata Kelola TI yang Lebih Baik

COBIT 4.1 adalah *framework* yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengontrol TI mereka secara efektif. *Framework* ini menyediakan panduan komprehensif untuk menghindari risiko dan memastikan bahwa TI berjalan sejalan dengan tujuan bisnis.

Dua domain utama dalam COBIT 4.1 yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. **PO8 (*Manage Quality*)** - Berfokus pada manajemen kualitas untuk memastikan bahwa layanan TI memenuhi standar yang diharapkan.
2. **PO10 (*Manage Project*)** - Bertujuan untuk memastikan proyek-proyek TI dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Hasil dari audit ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan (*maturity level*) dalam proses PO8 hanya mencapai 2.59, yang berarti masih perlu perbaikan dalam manajemen kualitas produk. Sementara itu, PO10 mencapai tingkat 3.02, yang menunjukkan bahwa manajemen proyek telah mencapai standar yang lebih baik namun masih memiliki ruang untuk peningkatan.

Dampak Implementasi COBIT 4.1 bagi Pelanggan

Salah satu aspek utama dari audit TI yang baik adalah memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. Dengan menerapkan COBIT 4.1, perusahaan dapat:

- Meningkatkan kualitas layanan dan produk yang diberikan kepada pelanggan.

- Memastikan proyek TI berjalan dengan baik sehingga tidak ada keterlambatan atau kegagalan dalam implementasi layanan digital.

Dari perspektif pelanggan, audit TI yang efektif berarti lebih sedikit gangguan dalam layanan, kecepatan respons yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Hal ini sangat penting dalam industri yang sangat kompetitif seperti *e-commerce*, perbankan digital, dan layanan berbasis *cloud*.

Strategi Perusahaan dalam Mengoptimalkan Tata Kelola TI

Agar audit TI memberikan hasil maksimal, perusahaan harus mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. **Mengoptimalkan *Quality Management System (QMS)*.**
Meninjau kembali metodologi yang digunakan dalam proses TI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. **Menerapkan Struktur Organisasi yang Jelas.**
Membuat prosedur kerja yang lebih sistematis dan sesuai dengan tanggung jawab tiap departemen.
3. **Meningkatkan Pelatihan untuk Karyawan.**
Memastikan bahwa tim TI memiliki keterampilan yang memadai dalam manajemen proyek dan layanan pelanggan.
4. **Melakukan Analisis dan Evaluasi Berkala.**
Audit TI tidak boleh berhenti pada satu tahap saja, tetapi harus terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.
5. **Melibatkan Pelanggan dalam Proses Evaluasi.**
Menggunakan survei dan feedback pelanggan untuk memahami bagaimana layanan TI dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Audit TI bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi atau prosedur perusahaan. Sebaliknya, audit TI adalah alat strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan operasional bisnis, dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Melalui penerapan COBIT 4.1, perusahaan dapat mengukur dan meningkatkan efektivitas tata kelola TI mereka. Dengan fokus pada *Manage Quality (P08)* dan *Manage Project (P010)*, bisnis dapat

memastikan bahwa setiap proyek TI berjalan dengan baik dan menghasilkan layanan yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.

Di era digital yang semakin berkembang, pelanggan tidak hanya menginginkan layanan yang cepat, tetapi juga berkualitas tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus mulai melihat audit TI sebagai investasi strategis yang dapat membantu mereka bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif.

Referensi

Wati, V., Febriani, S., & Sari, E. Y. (2024). Computational Analysis of IT Governance Audit Using COBIT 4.1 Framework: A Customer Perspective. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 8(1), 186-193. <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67caecb8c925c40de2079942/meningkatkan-kepuasan-pelanggan-dengan-audit-ti-mengapa-cobit-4-1-jadi-solusi-terbaik>

Benarkah Transparansi di ASEAN Hanya Ilusi? Fakta Mengagetkan di Balik Tata Kelola Perusahaan

16 Maret 2025, 17:40



Tahseen Mohsan Khan dan rekan-rekannya dalam jurnal mereka berusaha mengupas efektivitas dua model tata kelola perusahaan di ASEAN. Tetapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar tentang transparansi, atau hanya permainan statistik yang membungkus realitas bisnis yang lebih suram?

Masyarakat sering dibombardir dengan narasi bahwa *good governance* membawa keterbukaan, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tapi, mari kita lihat lebih dekat: apakah sistem *one-tier* benar-benar lebih unggul dibandingkan *two-tier*?

Para peneliti mengklaim bahwa perusahaan dengan *one-tier board* lebih transparan dalam pengungkapan informasi. Namun, transparansi macam apa yang mereka maksud? Apakah ini transparansi yang memang memudahkan investor memahami risiko dan peluang, atau sekadar laporan panjang dengan angka-angka yang sulit dicerna oleh publik?

Apakah Transparansi Itu Realitas atau Formalitas?

Artikel ini menyoroti bahwa jumlah perempuan dalam dewan direksi berkorelasi positif dengan transparansi. Ini terdengar progresif dan membangun narasi positif. Tetapi, kita perlu bertanya: apakah kehadiran perempuan di dewan benar-benar mengubah budaya perusahaan secara mendasar, atau ini hanya pemenuhan kuota demi pencitraan? Banyak perusahaan menempatkan perempuan di posisi simbolis, tanpa kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan.

Kekuasaan dan Oligarki dalam Two-Tier Board

Studi ini menunjukkan bahwa pemegang saham besar dan kekuatan dewan lebih berpengaruh dalam *two-tier board*. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lain: apakah sistem ini justru menciptakan oligarki yang lebih kuat, di mana keputusan hanya dipegang oleh segelintir orang yang sudah mengontrol bisnis sejak lama?

Statistik yang Menipu: Apakah Lebih Banyak Rapat Berarti Lebih Baik?

Artikel ini juga menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan berkorelasi positif dengan transparansi. Ini terdengar bagus di atas kertas, tetapi benarkah lebih banyak rapat berarti lebih baik? Banyak perusahaan multinasional yang memiliki ribuan rapat tiap tahun, tetapi tetap gagal mencegah skandal besar seperti kasus Enron atau 1MDB di Malaysia.

Transparansi vs. Lip Service

Penelitian ini berbicara soal peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan investor. Namun, siapa yang dijadikan patokan transparansi? Jika hanya berdasarkan seberapa sering laporan keuangan diterbitkan atau seberapa tebal dokumen-dokumen itu, maka kita sedang terjebak dalam keterbukaan yang semu.

Artikel ini memang memberikan wawasan berharga tentang tata kelola perusahaan di ASEAN. Namun, terlalu banyak faktor eksternal yang belum dipertimbangkan. Kita tidak bisa begitu saja menganggap bahwa *one-tier* lebih baik hanya karena terlihat lebih transparan di atas kertas. Sebab pada akhirnya, apakah transparansi ini betul-betul

mempermudah pemegang saham, atau hanya ilusi statistik untuk menunjukkan bahwa sistem ini lebih unggul?

Referensi

Khan, T. M., Nosheen, S., & Haq, N. U. (2020). Corporate governance mechanism and comparative analysis of one-tier and two-tier board structures: Evidence from ASEAN countries. *International Journal of Disclosure and Governance*.
<https://doi.org/10.1057/s41310-020-00075-0>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67d6aa8b34777c6916338b62/benarkah-transparansi-di-asean-hanya-ilusi-fakta-mengejutkan-di-balik-tata-kelola-perusahaan>

Benarkah Perusahaan Digital Aman? Fakta Mengagetkan Tentang Keamanan Siber!

24 Maret 2025, 16:28



Kita sering mendengar bahwa transformasi digital adalah masa depan. Perusahaan berlomba-lomba berinvestasi dalam AI, *cloud computing*, dan teknologi canggih lainnya. Namun, di balik narasi ini, ada satu pertanyaan besar: apakah semua ini benar-benar untuk efisiensi dan inovasi, atau hanya cara lain untuk menutupi risiko dengan jargon mewah?

Penelitian terbaru oleh Goh et al. (2023) menyebutkan bahwa investor sangat memperhatikan aspek *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dalam digitalisasi perusahaan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan:

Apakah Investor Benar-benar Peduli dengan GRC?

- Investor umumnya mencari profit. Jika sebuah perusahaan tampak menguntungkan, apakah mereka akan benar-benar mengecek strategi GRC sebelum berinvestasi?

- Banyak perusahaan dengan sistem GRC yang "sempurna" justru terlibat skandal besar Enron, Wirecard, dan FTX adalah contoh nyata.

GRG Sebagai Bentuk Lip Service?

- Perusahaan besar kini sering menyebut "GRG" dalam laporan tahunan mereka, tetapi apakah benar-benar ada perubahan nyata?
- Dalam banyak kasus, strategi GRC hanyalah formalitas untuk memenuhi persyaratan regulasi dan menarik investor yang skeptis.

Keamanan Siber: Realitas atau Sekadar Kampanye Pemasaran?

- Studi ini menyebutkan bahwa digitalisasi meningkatkan risiko keamanan siber. Namun, berapa banyak perusahaan yang benar-benar siap menghadapi ancaman ini?
- Setiap tahun, kita melihat pelanggaran data besar yang mengungkap betapa lemahnya keamanan digital, meskipun perusahaan mengklaim telah menerapkan GRC yang ketat.

Digitalisasi Justru Menambah Kompleksitas Regulasi

- Penelitian ini menyoroti bahwa regulasi menjadi semakin kompleks seiring dengan transformasi digital.
- Jika tujuan digitalisasi adalah efisiensi, mengapa malah menambah lapisan birokrasi dan regulasi baru?

Investor Itu Realistik, Bukan Idealistik

- Investor menginginkan keuntungan, bukan sekadar dokumen panjang soal kepatuhan dan tata kelola.
- Jika perusahaan dengan strategi GRC yang "lemah" tetap bisa mencetak profit besar, akankah investor benar-benar peduli?

Penelitian ini memang menunjukkan bahwa investor memperhatikan aspek GRC dalam digitalisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang hanya menggunakan GRC sebagai alat pemasaran untuk membangun kepercayaan investor. Apakah kita benar-benar

berada di era transparansi digital, atau ini hanyalah permainan ilusi yang dikendalikan oleh perusahaan dan regulator?

Referensi

Goh, C., Kusnadi, Y., Pan, G., & Seow, P. S. (2023). Governance, Risk and Compliance (GRC) in Digital Transformation: Investor Views. *Singapore Management University.*

<https://ssrn.com/abstract=4276136>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67e125d234777c369b110172/benarkah-perusahaan-digital-aman-fakta-mengejutkan-tentang-keamanan-siber>

Tata Kelola TI: Revolusi atau Sekedar Birokrasi Digital?

29 Maret 2025, 22:13



Di era digital ini, kita sering mendengar tentang pentingnya tata kelola TI untuk memastikan efektivitas dan keamanan teknologi dalam organisasi. Namun, apakah ini benar-benar sebuah revolusi yang membawa perubahan nyata, atau hanya sekadar lapisan birokrasi tambahan yang memperlambat inovasi?

Banyak organisasi mengadopsi *framework* seperti COBIT atau ITIL dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Namun, fakta di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Implementasi tata kelola TI yang berlebihan justru menciptakan lebih banyak hambatan, menghambat kreativitas, dan membuat organisasi lebih lambat dalam merespons perubahan pasar.

Selain itu, model tata kelola TI sering kali dikembangkan oleh konsultan dan akademisi yang jauh dari realitas bisnis sehari-hari. Mereka mendesain sistem yang tampak sempurna di atas kertas, tetapi sulit diterapkan di dunia nyata. Hasilnya? Perusahaan terjebak dalam siklus audit, dokumen yang menumpuk, dan rapat yang tak berujung tanpa ada manfaat nyata.

Lebih parah lagi, banyak perusahaan yang menerapkan tata kelola TI hanya demi kepatuhan terhadap regulasi, bukan karena kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Ini menyebabkan pengeluaran besar untuk implementasi *framework* yang tidak efektif, sementara inovasi yang lebih penting justru terabaikan.

Di sisi lain, startup teknologi yang bergerak cepat sering kali mengabaikan *framework* tata kelola TI yang kompleks dan justru lebih sukses. Mereka mengutamakan fleksibilitas dan iterasi cepat daripada terjebak dalam struktur yang kaku. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah *framework IT Governance* masih relevan dalam dunia bisnis yang semakin dinamis?

Mungkin sudah saatnya kita mempertanyakan kembali apakah *framework* ini benar-benar diperlukan, atau hanya strategi pemasaran dari industri konsultasi yang ingin menjual "solusi" mereka. Daripada mengadopsi model yang tidak sesuai dengan realitas bisnis, perusahaan seharusnya lebih fokus pada pendekatan yang praktis dan fleksibel.

Tata kelola TI seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan bisnis, bukan sekadar simbol kepatuhan. Jika tidak diterapkan dengan tepat, *framework* ini tidak lebih dari sekadar birokrasi digital yang justru memperlambat pertumbuhan organisasi.

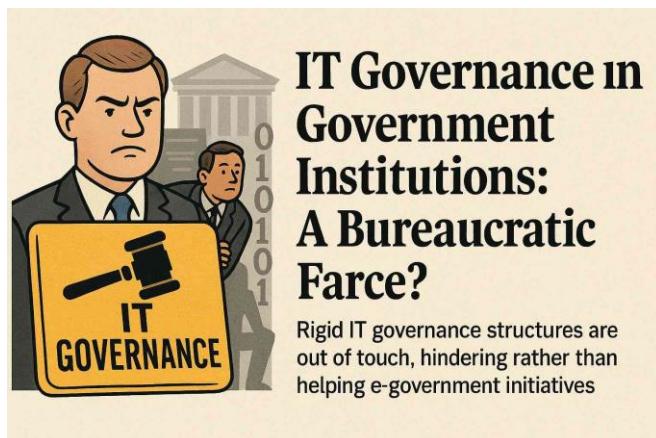
Referensi:

- Nurfadhiyah, A., Faharuddin, F., & Jumaryadi, Y. (2024). IT Governance Information System Audit Analysis using COBIT 4.1 Framework by measuring Maturity Level. *SISTEMASI*, 13(2), 412. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i2.2825>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67e80e3034777c705e6c5df2/tata-kelola-ti-revolusi-atau-sekedar-birokrasi-digital>

Tata Kelola TI Pemerintah: Mewah di Atas Kerta, Mandek di Lapangan?

15 April 2025, 08:07



Di atas kertas, segala sesuatu tampak rapi dan sempurna. *Framework* seperti COBIT 2019 dirancang untuk menjawab semua masalah manajemen TI dengan struktur yang elegan, lengkap dengan indikator, penilaian, dan tata cara implementasi. Namun, ketika *framework* global ini diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah seperti Provinsi Jawa Barat, apakah benar-benar berdampak?

Artikel ini menyoroti betapa telitinya upaya pemerintah dalam merancang sistem manajemen TI berbasis COBIT 2019. Mereka menyusun strategi, memetakan risiko, menilai kebutuhan teknologi, hingga mencocokkan dengan kebijakan nasional. Tapi pertanyaannya: apakah proses ini menciptakan nilai nyata, atau sekadar membangun lapisan birokrasi digital yang makin rumit?

Mari kita realistik. Banyak pemerintahan lokal di Indonesia masih berkutat dengan infrastruktur TI yang tidak memadai, minimnya SDM ahli, serta rendahnya budaya organisasi terhadap teknologi. Dalam situasi ini, apakah penyusunan 12 praktik manajemen TI akan benar-

benar dijalankan, atau hanya menjadi dokumen indah yang tersimpan di rak?

Framework seperti COBIT 2019 memang kuat secara teoritis, tetapi butuh kedewasaan organisasi dan kesiapan budaya untuk dijalankan. Banyak instansi yang malah menggunakan *framework* ini untuk sekadar "menunjukkan keseriusan" tanpa benar-benar menginternalisasi prinsipnya. Audit dilakukan, laporan disusun, tapi sistem tidak berubah.

Lebih berbahaya lagi, pendekatan ini bisa menciptakan *false sense of security* seolah-olah semua sudah terkendali karena sudah punya *framework*, padahal di balik layar, pelatihan pegawai TI masih minim, data masih tercecer, dan proses digitalisasi stagnan.

Harus diakui, artikel ini membawa pesan penting bahwa *IT governance* harus disesuaikan dengan karakter organisasi. Namun kita juga harus skeptis: apakah organisasi pemerintah benar-benar siap berubah, atau mereka hanya menyesuaikan format agar tampak patuh regulasi?

Sudah waktunya kita menanyakan: Apakah kita butuh *framework* yang canggih, atau justru perombakan mindset dan budaya kerja? Karena tanpa perubahan sikap dan keberanian untuk eksekusi, bahkan model tata kelola terbaik pun hanya akan jadi presentasi *PowerPoint* yang mengesankan, tapi tidak menghasilkan layanan publik yang lebih baik.

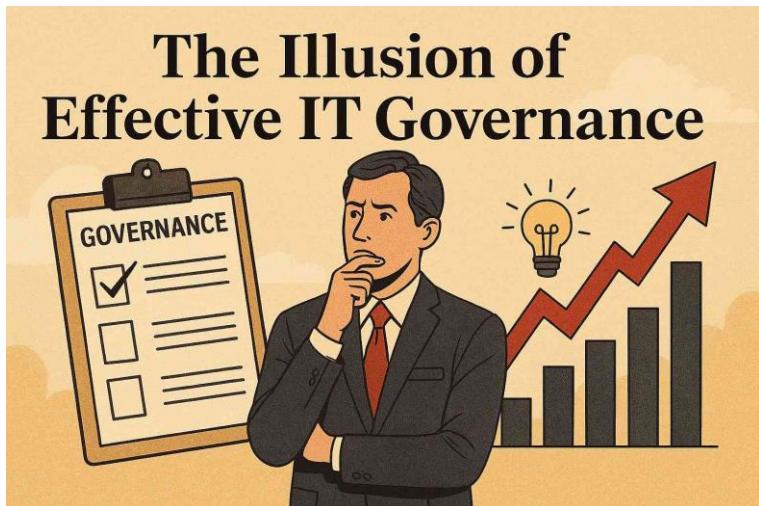
Referensi :

- Hanafi, R., Munir, M., Suwatno, S., & Furqon, C. (2023). Identification of IT Governance and Management Objectives and Target Process Capability Level in Government Institution. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 7(2), 290–306.
<https://doi.org/10.29407/intensif.v7i2.20108>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67fdb14834777c68632e7172/tata-kelola-ti-pemerintah-mewah-di atas-kerta-mandek-di-lapangan>

Kerangka Tata Kelola TI: Struktur Ideal yang Gagal di Realita?

15 April 2025, 10:07



Kerangka kerja tata kelola TI seperti COBIT dan ISO 27001 telah menjadi jargon populer di dunia korporat. Semua terdengar meyakinkan: manajemen risiko, kepatuhan, efisiensi, dan sinergi antara TI dan bisnis. Tapi, apakah *framework* ini benar-benar diterapkan secara nyata, atau hanya menjadi dokumen tebal yang dibaca hanya saat audit?

Artikel ini memaparkan dengan rapi berbagai dimensi *IT Governance*: mulai dari penetapan peran yang jelas, pentingnya keterlibatan karyawan, hingga kebutuhan akan manajemen risiko yang matang. Namun, ketika hasil analisis regresi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara praktik manajemen dan kerangka kerja TI, kita patut curiga apakah *framework* ini hanya simbol kepatuhan belaka?

Terlalu sering kita melihat organisasi yang berupaya terlihat modern dan patuh dengan menampilkan slide PowerPoint penuh logo ISO dan COBIT. Tapi realitanya? SOP tidak dijalankan, karyawan bingung dengan peran mereka, dan tim TI bekerja reaktif, bukan strategis.

Parahnya, birokrasi yang ditimbulkan dari *framework* ini justru memperlambat inovasi.

Dan mari bicara soal karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan mendorong keterlibatan pegawai. Tapi apakah keterlibatan ini benar-benar berarti? Bisa jadi, karyawan hanya menandatangani pelatihan dan mengikuti checklist, tanpa benar-benar paham atau peduli. Keterlibatan semu seperti ini menipu organisasi bahwa mereka sudah “patuh dan aman.”

Poin menarik lainnya adalah tingginya korelasi antara kepatuhan dan efektivitas *governance*, namun tetap ada keraguan dalam signifikansinya. Ini menunjukkan betapa rapuhnya asumsi kita bahwa lebih banyak regulasi dan dokumen berarti lebih baik. Nyatanya, banyak perusahaan yang tenggelam dalam formalitas, tapi kehilangan urgensi dalam inovasi dan pelayanan.

Organisasi harus berhenti menjadikan *framework* sebagai tujuan akhir. *Framework* adalah alat, bukan agama. Jika diterapkan secara kaku, tanpa pemahaman budaya organisasi, tanpa pelibatan nyata dari manajemen, dan tanpa evaluasi rutin, maka semua *framework* itu hanyalah topeng: terlihat modern, tapi kosong di dalam.

Sudah waktunya kita mempertanyakan apakah organisasi kita benar-benar menerapkan prinsip tata kelola TI, atau hanya sekadar menyenangkan auditor dan regulator. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya compliance, tapi juga keberanian untuk jujur melihat kondisi internal dan kesiapan untuk berubah.

Referensi :

Suresh, N., Varalakshmi, T., & Chand, M. S. (2024). IT Governance Framework Ensuring Effective Management and Compliance. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management*, 2(5), 1627–1632.
<https://doi.org/10.47392/IRJAEM.2024.0227>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/67fdb67134777c333e1ce032/kerangka-tata-kelola-ti-struktur-ideal-yang-gagal-di-rea>

Kenaikan *Maturity* Cuma 0.05 Poin? Serius Kita Mau Rayakan Ini?

11 Mei 2025, 08:47



Bayangkan Anda punya perusahaan raksasa, milik negara pula. Lalu setiap tahun, Anda mengukur seberapa baik perusahaan itu mengelola teknologinya. Dan hasilnya? Kenaikan skor cuma 0.05. Dari 3.21 ke 3.26. Skala penilaian dari 0 sampai 5. Apakah ini layak dipuji? Atau justru tanda tanya besar soal arah digitalisasi di perusahaan-perusahaan BUMN kita?

Itulah yang disajikan dalam sebuah artikel akademik tentang evaluasi *IT Governance* di PT X sebuah perusahaan BUMN yang tidak disebutkan namanya. Evaluasi ini menggunakan COBIT 4.1 (*framework* lama, dirilis lebih dari 15 tahun lalu). Mereka menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur IT dan pelatihan staf menjadi dua faktor paling berpengaruh terhadap peningkatan skor tersebut.

Terdengar bagus? Tunggu dulu.

COBIT 4.1 bukan lagi standar terbaru. Kita sudah masuk era COBIT 2019. Tapi banyak organisasi, termasuk BUMN, masih bermain aman dengan standar lama mungkin karena familiar, atau mungkin karena

enggan repot belajar ulang. Tapi kalau kita bicara “*transformasi digital*”, kenapa masih pakai alat ukur dari era Blackberry?

Mari kita kuliti satu demi satu. Pertama, kenaikan skor 0.05 itu sangat minim. Apalagi dalam konteks skala 0–5. Ini ibarat orang naik berat badan 50 gram dalam setahun dan mengklaim “tubuh saya berkembang!” Peningkatan ini bahkan bisa dikalahkan oleh kesalahan pengukuran atau formalitas pelatihan yang tidak berdampak nyata.

Kedua, indikator keberhasilan yang digunakan hanya seputar dokumen dan pelatihan. Kalau hanya dengan membuat “Prosedur Perencanaan Strategis TI” atau meng-update “*IT Master Plan*”, lalu nilainya naik 0.05, apakah benar itu tanda kemajuan atau cuma tanda kita pintar membuat kertas kerja?

Jadi kita seolah terjebak dalam ilusi tata kelola. Mengira bahwa *compliance* adalah pencapaian, padahal itu hanya baseline. Fokus terhadap angka “*maturity*” bisa membuat kita kehilangan esensi: bahwa teknologi harus memberi dampak nyata, bukan sekadar mencatat checklist dalam audit.

Yang lebih menyedihkan, artikel ini justru menyimpulkan bahwa hasil mereka bisa menjadi acuan bagi BUMN lain. Tapi kalau semua perusahaan hanya meniru model ini dengan target peningkatan 0.05 per tahun maka butuh 16 tahun untuk mencapai level 4. Dan nyaris seumur karier untuk ke level 5. Apakah kita benar-benar mau menunggu selama itu di tengah tekanan global yang kompetitif?

Referensi :

Fauzi, R., & Mulyana, R. (2020). Key Factors in Improving the *Maturity* of Information Technology Governance: A Case Study of State-owned Enterprise in Indonesia. *International Journal of Innovation in Enterprise System*, 04(02), 60–71.
<https://ijies.sie.telkomuniversity.ac.id/index.php/IJIES/index>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/682001bc34777c5d5c4c4ab2/kenaikan-maturity-cuma-0-05-poin-serius-kita-mau-rayakan-ini>

COBIT 5 di Kampus: Tata Kelola atau Sekedar Gaya-Gayaan?

11 Mei 2025, 09:55



Membaca artikel tentang penerapan COBIT 5 di sebuah universitas terasa seperti melihat seseorang membeli lemari besi mahal untuk menyimpan uang receh. Ambisinya besar, strukturnya megah, tapi kenyataan di lapangan? Masih jauh panggang dari api.

COBIT 5 adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi. Hebat di atas kertas, meyakinkan dalam seminar, dan tentu saja, terdengar canggih di proposal anggaran. Tapi apakah universitas betul-betul membutuhkannya? Atau sekadar ingin tampil modern dan "*akuntabel*" di mata auditor?

Artikel ini menyajikan hasil evaluasi menggunakan COBIT 5 di Universitas XYZ. Hasilnya? Mayoritas area pengelolaan TI hanya berada di level 2 dari skala 0-5 alias baru sebatas "niat". Proses memang mulai dikelola, tapi belum standar, belum terukur, dan belum konsisten. Masalah klasik: rencana ada, pelaksanaan belum.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metodenya sah, tetapi juga rawan bias. Penilaian hanya dari satu pihak, yaitu para

pengelola TI itu sendiri. Tidak ada suara dari pengguna layanan TI, dosen, mahasiswa, atau unit pendukung lainnya. Padahal, mereka adalah pihak yang paling merasakan dampaknya.

Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada upaya menyelami akar masalah. Padahal kita tahu, banyak organisasi pendidikan tinggi mengalami tantangan klasik: anggaran terbatas, sumber daya manusia minim, budaya organisasi yang resisten terhadap perubahan, dan struktur TI yang tidak terintegrasi. Tapi semua itu justru diabaikan.

Alih-alih menyarankan solusi yang membumi, artikel ini malah menguatkan ilusi: bahwa dengan COBIT 5, semua bisa beres. Padahal, jika fondasi organisasi belum siap, penerapan kerangka kerja sekompelks apapun hanya akan jadi dokumen di laci, bukan perubahan nyata.

COBIT 5 punya tempatnya di perusahaan besar, institusi finansial, atau lembaga pemerintah dengan struktur dan sumber daya memadai. Tapi pada institusi pendidikan yang masih berkutat pada persoalan dasar seperti integrasi sistem akademik, keandalan jaringan, atau keamanan data mahasiswa, COBIT bisa jadi terlalu ambisius.

Ironisnya, saat proses digitalisasi sudah berjalan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif seperti ITIL, *agile*, atau *DevOp* universitas justru sibuk mengejar penilaian kerangka kerja yang terlalu berat dijalankan. Ini bukan soal salah pilih kerangka, tetapi soal salah ukur diri.

COBIT seharusnya bukan tujuan, melainkan alat. Dan seperti alat lainnya, efektivitasnya bergantung pada kesiapan pengguna. Menyematkan kerangka kerja elite pada struktur yang belum matang ibarat memakaikan jas Armani pada tukang bangunan yang sedang mencangkul. Terlihat keren di brosur, tapi tidak berguna di lapangan.

Yang dibutuhkan universitas hari ini adalah tata kelola TI yang adaptif, kontekstual, dan bertahap. Bukan sekadar memenuhi daftar isian audit atau mengikuti tren global. Jika diagnosisnya tidak tepat, jangan heran bila resepnya malah memperparah keadaan.

Kesimpulannya sebelum mengadopsi kerangka kerja megah, tanya dulu, “apa yang benar-benar dibutuhkan institusi ini?” Karena teknologi, seberapapun canggihnya, tak akan memberi nilai jika tidak

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang menggunakannya.

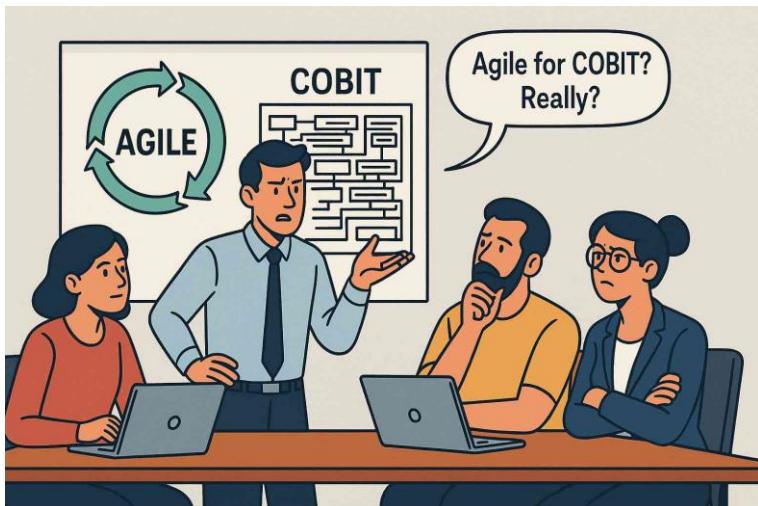
Referensi :

Ardiansyah, R. F., Wahyuni, D. S., & Irawan, A. F. (2021). Assessing IT Governance Implementation Using COBIT 5 Framework at XYZ University. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 7(1), 19–26.
<https://doi.org/10.20473/jisebi.v7i1.22958>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/682007edc925c42ccf02c4e2/cobit-5-di-kampus-tata-kelola-atau-sekedar-gaya-gayaan>

Agile untuk COBIT? Lincah atau Lari dari Masalah?

11 Mei 2025, 11:05



Artikel "*Using agile methodologies for adopting COBIT*" ini mengusulkan agar kita menggunakan metode agile seperti *Scrum* dan *SAFe* untuk menerapkan COBIT 5. Masalahnya? COBIT 5 itu *framework* yang kompleks ribuan relasi antar proses, puluhan peran, dan seabrek dokumentasi. Lalu kita disuruh menyelesaikannya dengan sprint 1 minggu dan backlog yang disusun di *whiteboard*? Kedengarannya seperti menyelesaikan birokrasi kementerian dengan sticky notes.

Penulis artikel mencatat bahwa *agile* memang meningkatkan keterlibatan manajemen dan membuat kesalahan bisa cepat dideteksi. Tapi kemudian mereka mengakui: *agile* tidak cukup untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Ini seperti mengatakan, "Kami sudah pakai GPS, tapi tetap nyasar karena semua penumpang menolak belok."

Lebih jauh lagi, pendekatan ini menambah kompleksitas baru. Menggunakan *SAFe* (yang notabene *framework* agile paling rumit)

untuk menyederhanakan COBIT 5? Itu ibarat menambal kapal bocor dengan sistem autopilot kompleks di atas kompleks.

Ada juga inkonsistensi mendasar: peneliti menyarankan menghapus “*Sprint 0*” karena tidak berguna, tetapi tetap mempertahankan pendekatan *Water Scrum Fall* artinya mereka tahu bahwa proyek ini tetap harus dimulai dengan fase perencanaan yang tidak *agile*. Jadi, mengapa repot-repot memaksakan label *agile*?

Dan ini bukan cuma soal metodologi. Ini tentang ilusi solusi. Kita terlalu sering berpikir bahwa ganti metode = ganti hasil. Padahal, kalau budaya organisasi masih takut berubah, belum tentu *Scrum* atau SAFe bisa mengatasi mentalitas “yang penting aman dan sesuai SOP”.

Dalam praktiknya, menggabungkan COBIT dan agile bisa jadi berujung pada satu hal: metodologi Frankenstein potongan sana-sini, campur aduk *framework*, hasilnya tidak organik. Bisa jalan, tapi tidak elegan. Bisa berhasil, tapi hanya kalau dipaksa dan diawasi ketat.

Apakah pendekatan ini layak dicoba? Ya, mungkin. Tapi dengan satu syarat: kita harus berhenti berharap bahwa agile adalah jimat. Dan kita harus siap menerima kenyataan bahwa resistensi organisasi terhadap perubahan bukan cuma masalah metodologi, tapi masalah politik, budaya, dan insentif yang jauh lebih dalam.

Referensi :

Amorim, A. C., Mira da Silva, M., Pereira, R., & Gonçalves, M. (2020). Using agile methodologies for adopting COBIT. *Information Systems*, 101496. <https://doi.org/10.1016/j.is.2020.101496>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/68201089c925c42fbd4ed652/agile-untuk-cobit-lincah-atau-lari-dari-masalah>

TI Hebat, Bisnis Hebat? Nanti Dulu!

11 Mei 2025, 12:15



Dalam dunia yang dipenuhi jargon digital, artikel ini datang seperti mantra lama yang dilapisi pernis akademik. Judulnya megah: *Impact of IT Governance Process Capability on Business Performance*. Tapi pertanyaannya: apakah benar "kemampuan proses tata kelola TI" bisa mengangkat performa bisnis perusahaan?

Sekilas, jawabannya adalah "iya". Tapi mari kita kupas lebih dalam, dan lihat apakah ini solusi nyata atau sekadar pemberian manajerial.

Penelitian ini menyatakan bahwa jika perusahaan punya proses TI yang tertata mulai dari keputusan, perencanaan, modernisasi infrastruktur, layanan, hingga monitoring maka performa TI-nya meningkat, dan ini berdampak ke bisnis. Sekilas masuk akal. Tapi tidakkah itu logika bunder yang sudah jelas sejak awal? Tentu, jika Anda mengatur sesuatu dengan baik, hasilnya akan baik. Apakah perlu riset global 881 perusahaan hanya untuk mengatakan itu?

Lebih parah lagi, artikel ini membuat kesalahan klasik akademisi: menganggap "korelasi sebagai kausalitas". Meski ada model statistik rumit dan *software* bernama ADANCO 2.2 disebut-sebut, kita tetap

perlu bertanya: apakah perusahaan sukses karena tata kelola TI-nya hebat, ataukah karena mereka sudah hebat duluan sehingga bisa berinvestasi dalam tata kelola TI yang lebih baik?

Dan bicara tentang kerangka kerja, COBIT kembali diseret ke panggung. Seolah-olah setiap masalah TI bisa diselesaikan jika perusahaan sadar dan “taat” pada COBIT. Padahal kita tahu, banyak perusahaan mengadopsi *framework* bukan karena paham, tapi karena tuntutan sertifikasi dan audit eksternal. Lebih pada compliance daripada kompetensi.

Yang lebih menggelikan adalah bagaimana industri diklasifikasikan: ada yang *automate*, *informate*, dan *transform*. Ini pembagian yang terdengar akademis tapi menyesatkan. Sebuah perusahaan bisa jadi masuk semua kategori itu secara bersamaan. Bagaimana jika transformasi dilakukan melalui otomatisasi? Apakah perusahaan itu harus dipotong-potong agar masuk kotak definisi peneliti?

Mereka memang menyebut hasil penelitian “mengejutkan”: industri *automate* malah lebih unggul dibanding yang *transform*. Tapi tidak ada jawaban memuaskan. Hanya tebakan: mungkin karena yang *automate* sudah lebih matang. Ya, mungkin. Tapi bukankah itu justru mengguncang inti argumen mereka? Kalau industri yang seharusnya hanya mengotomatisasi malah unggul, lalu bagaimana peran “strategis” TI sebenarnya?

Lalu siapa responden survei ini? Mayoritas adalah eksekutif TI atau audit. Tentu saja mereka akan menilai tinggi proses yang mereka kelola. Ini seperti menilai restoran dari kokinya sendiri.

Penelitian ini lebih cocok disebut sebagai validasi internal *framework*, bukan penemuan baru. Ini menguatkan sesuatu yang komunitas *IT governance* sudah lama “percaya” tapi belum tentu terbukti universal.

Bisnis yang sukses tidak hanya ditentukan oleh proses formal. Budaya, visi, kepemimpinan, kelincahan, dan konteks industri jauh lebih dinamis dari yang bisa ditangkap oleh survei skala Likert 1–5.

Jika Anda seorang pemimpin bisnis dan membaca artikel ini, jangan terburu-buru menyuruh tim Anda membuat roadmap COBIT hanya karena “katanya bisa meningkatkan performa bisnis.” Sebaliknya, tanyakan: Apakah tim Anda benar-benar paham kebutuhan bisnis? Apakah teknologi yang mereka usulkan punya dampak nyata?

Tata kelola TI bukan sekadar kerangka kerja, tetapi soal keberanian mengambil keputusan sulit, menghindari investasi sia-sia, dan mengutamakan *value* daripada *compliance*. Artikel ini belum sampai ke sana.

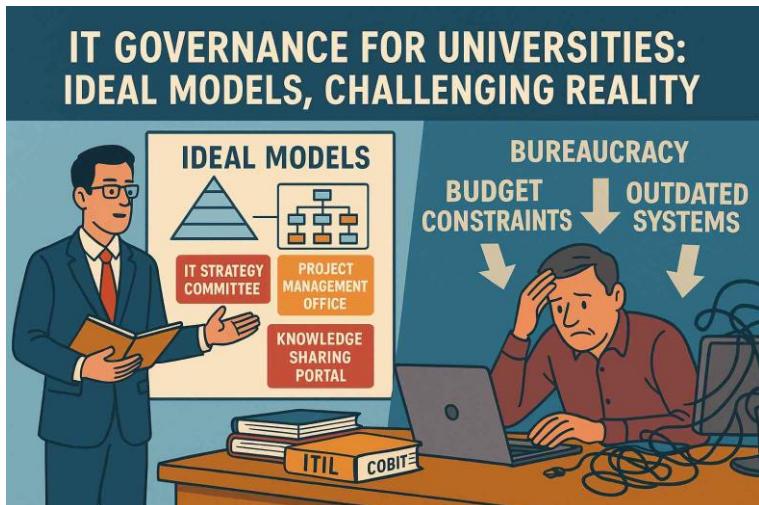
Referensi :

Joshi, A., Benitez, J., Huygh, T., Ruiz, L., & De Haes, S. (2021). Impact of IT governance process capability on business performance: Theory and empirical evidence. *Decision Support Systems*, 113668. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113668>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/68201423c925c46b6e0829d2/ti-hebat-bisnis-hebat-nanti-dulu>

Mau COBIT, ITIL, ISO? Kalau Anggaran Tak Ada, Semua Percuma

11 Mei 2025, 14:07



Satu hal yang selalu menarik dari studi semacam ini adalah ambisinya. Artikel ini memaparkan begitu banyak praktik tata kelola IT mulai dari struktur, proses, hingga mekanisme relasional yang katanya “ideal” untuk diterapkan di universitas. Tapi membaca semuanya terasa seperti melihat resep masakan dari buku gourmet: mewah di atas kertas, tapi coba masak sendiri dengan kompor rusak dan bahan seadanya.

Penelitian ini mencoba membuat baseline model semacam paket standar dari praktik tata kelola IT yang dianggap cocok untuk universitas. Mengacu pada 46 praktik, mereka menjaring data dari puluhan studi, dan menguji modelnya di 10 universitas dari lima negara. Lengkap? Mungkin. Relevan? Belum tentu.

Mengapa? Karena model ini mencoba menjawab masalah kompleks dengan solusi universal. Padahal, artikel ini sendiri mengakui bahwa “tidak ada satu model *IT Governance* yang cocok untuk semua organisasi.” Tapi anehnya, di bagian akhir tetap menyodorkan satu

baseline sebagai “rekomendasi umum”. Ini seperti dokter yang bilang, “setiap pasien itu unik,” lalu tetap kasih semua orang obat yang sama.

Kita bicara soal universitas organisasi yang tidak hanya berbeda dari industri biasa, tapi juga memiliki tujuan non-komersial, struktur birokratis yang kaku, serta budaya yang sangat heterogen. Implementasi praktik semacam “*IT Strategy Committee*”, “*Project Management Office*”, hingga “*Knowledge Sharing Portal*” terdengar bagus, tapi apakah realistik?

Coba bayangkan universitas negeri di negara berkembang, dengan sistem pengadaan yang lambat, staf IT yang multitugas dari pagi sampai sore, dan keputusan strategis yang bergantung pada rapat panjang nan bertele-tele. Lalu kita sodorkan kerangka kerja seperti ITIL, COBIT, ISO 38500 tanpa dukungan anggaran, pelatihan, atau kesadaran manajemen. Hasilnya? Sekadar dokumen formalitas untuk mengejar akreditasi atau audit tahunan.

Artikel ini memang menyebutkan tantangan seperti keterbatasan SDM, waktu, dan budaya organisasi. Tapi sayangnya, tak banyak solusi konkret yang disajikan. Di sisi lain, rekomendasi seperti “*engagement* antara akademisi dan staf IT” atau “*pengujian berbagai solusi IT di kampus*” lebih terdengar sebagai cita-cita daripada strategi implementasi nyata.

Model “ideal” yang diajukan juga tampak sangat berat sebelah pada formalitas struktur padahal tantangan terbesar justru ada pada manusia dan budaya organisasi. Di kampus, sistem gagal bukan karena tak ada struktur, tapi karena struktur itu tak pernah dijalankan. Komite dibentuk, tapi tak pernah rapat. Dashboard dibangun, tapi tak pernah dipakai. SOP ditulis, tapi tak pernah dibaca.

Di sinilah letak ironi terbesar: semakin tebal dokumennya, semakin jauh dari realitas lapangan. Maka penting untuk menyuarakan alternatif yang lebih membumi: tata kelola TI harus adaptif, modular, dan kontekstual. Jangan paksakan universitas mengadopsi struktur formal yang tak mampu mereka jalankan. Lebih baik fokus pada perubahan kecil yang berdampak besar: komunikasi antar unit yang lebih baik, pelatihan praktis untuk staf IT, sistem *helpdesk* yang responsif.

Karena pada akhirnya, efektivitas *IT Governance* bukan soal seberapa banyak *framework* yang dipakai, tapi seberapa nyata perubahan yang dirasakan oleh pengguna teknologi dosen, mahasiswa, dan staf.

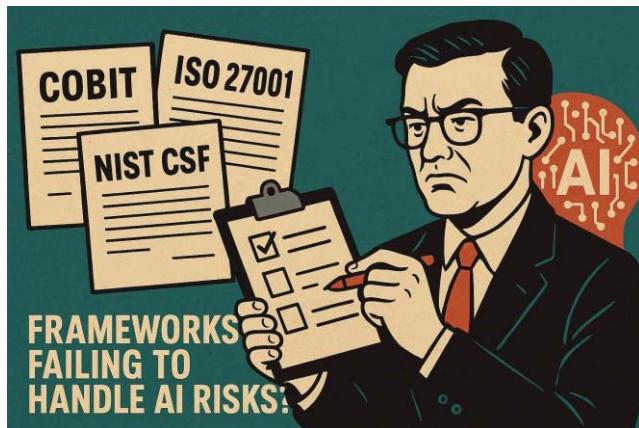
Referensi:

Bianchi, I. S., Sousa, R. D., & Pereira, R. (2021). Information Technology Governance for Higher Education Institutions: A Multi-Country Study. *Informatics*, 8(2), 26.
<https://doi.org/10.3390/informatics8020026>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/68202269ed641509b43c9ff2/mau-cobit-itil-iso-kalau-anggaran-tak-ada-semua-percuma>

Framework Keamanan Siber Sudah Usang? Ini Buktinya

11 Mei 2025, 15:15



Di era ketika teknologi AI semakin menggila, organisasi berlomba-lomba mengintegrasikan *Large Language Models* (LLM) ke dalam sistem mereka. Tapi tunggu dulu. Apakah semua standar tata kelola TI dan keamanan informasi benar-benar siap?

Kita bicara soal LLM yang bisa menghasilkan konten menyesatkan, menciptakan ancaman keamanan baru, dan bahkan memalsukan insiden keamanan. Namun sebagian besar kerangka kerja ini belum punya kontrol spesifik untuk menghadapinya. Mereka masih mengandalkan konsep-konsep lawas seperti "kebijakan", "audit", dan "monitoring" yang tidak cukup cepat atau akurat untuk mengawasi mesin supercerdas yang bisa membuat keputusan sendiri.

ISO 42001 yang paling baru pun hanya menang di branding. Isinya? Masih kabur dan minim instruksi teknis. Ini seperti menyuruh satpam dengan buku peraturan tahun 1999 untuk menjaga data center generasi ChatGPT. COBIT memang selaras dengan EU AI Act undang-undang baru dari Uni Eropa yang mulai mengetatkan aturan AI. Tapi dalam praktiknya, COBIT tetap gagal memberikan kontrol teknis atas "*hallucination*" LLM yang bisa menyebabkan kebijakan salah, keputusan keliru, dan laporan insiden fiktif. Bahkan NIST CSF 2.0 yang

sangat populer pun hanya lulus dua dari tujuh aspek risiko LLM. Tragis.

Kesenjangan ini menandakan satu hal: Dunia GRC (*Governance, Risk, Compliance*) belum siap menerima AI. Organisasi yang mengandalkan *framework* ini tanpa tambahan validasi manusia akan terjebak dalam ilusi kepatuhan. Yang lebih parah, mereka bisa menempatkan kepercayaan pada sistem yang sebenarnya sedang menciptakan risiko baru.

Kerangka kerja saat ini memang bagus sebagai titik awal. Tapi untuk menghadapi AI, kita butuh pendekatan multi-disiplin: keamanan sistem, etika AI, psikologi perilaku, dan bahkan hukum. Kalau *framework* hanya bicara soal "*training dan awareness*", bagaimana mungkin ia bisa menangani model AI yang bisa membuat skenario serangan siber dalam bahasa yang meyakinkan?

Kalau kita tidak segera merevisi *framework* ini, kita akan melihat lebih banyak "kecelakaan" AI. Audit palsu, laporan ancaman buatan, sistem yang membuat keputusan diskriminatif semuanya mungkin, dan semuanya tidak dijawab *framework* saat ini. Kita butuh kerangka kerja yang bisa menghadapi mesin yang bisa berbohong dengan meyakinkan.

Apakah organisasi benar-benar aman, atau mereka hanya merasa aman karena sudah "*compliant*"? Kalau *framework*-nya tidak tahu cara kerja AI, seharusnya kita berhenti menyembah logo-logo sertifikasi itu. Kita tidak butuh kepatuhan kita butuh pengawasan yang nyata.

Referensi:

McIntosh, T. R., Susnjak, T., Liu, T., Watters, P., Xu, D., Liu, D., Nowrozy, R., & Halgamuge, M. N. (2024). From COBIT to ISO 42001: Evaluating cybersecurity frameworks for opportunities, risks, and regulatory compliance in commercializing large language models. *Computers & Security*, 144, 103964.
<https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103964>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/68204a46c925c471ed1f9582/framework-keamanan-siber-sudah-usang-ini-buktinya>

COBIT 5 di Kampus: Mimpi Indah Tata Kelola IT yang Terlalu Muluk?

11 Mei 2025, 18:10



Sudah waktunya kita berhenti memuja kerangka kerja tata kelola TI seperti COBIT 5 seolah-olah itu adalah obat mujarab semua penyakit digital di organisasi pendidikan. Artikel ini yang tampaknya niat baiknya tidak diragukan mencoba menerapkan COBIT 5 di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Tapi pertanyaannya: apakah benar-benar cocok, atau justru *overkill*?

COBIT 5 itu kompleks, birokratis, dan penuh jargon. Dan artikel ini seolah menegaskan: kampus kita bahkan belum siap menyentuh permukaannya. Penilaian mereka masih berada pada tingkat “cukup” alias belum optimal di hampir semua domain. Apakah ini bukti bahwa *framework* ini memang tidak realistik untuk konteks kita? Atau hanya membuktikan bahwa kita memaksakan alat canggih ke tangan yang bahkan belum terbiasa memegang obeng?

Artikel ini menggarisbawahi kekurangan dalam perencanaan TI, kurangnya evaluasi, dan lemahnya monitoring. Tapi tunggu bukankah itu gejala dari masalah manajerial dan budaya organisasi, bukan sekadar kurangnya *framework*? Menyerahkan masalah mendasar itu

pada COBIT adalah seperti berharap software bisa menyelesaikan masalah malasnya kerja tim.

Lebih jauh, COBIT 5 menuntut komitmen organisasi tinggi: SDM terlatih, proses terdokumentasi rapi, evaluasi rutin. Dalam praktiknya, banyak institusi pendidikan di Indonesia tidak punya waktu, anggaran, atau kepemimpinan untuk menjalankan ini semua. Jadi pertanyaannya: kenapa kita masih berkukuh memakai alat yang tidak kita pahami dan tak bisa kita jalankan dengan serius?

Artikel ini menyarankan “peningkatan dalam manajemen risiko dan manajemen strategi TI”. Saran tersebut klise. Tanpa transformasi budaya organisasi dan peningkatan literasi digital pimpinan kampus, saran itu akan menguap begitu saja di notulen rapat.

Lebih menarik lagi, artikel ini seperti menyembunyikan fakta bahwa mereka tidak benar-benar menjalankan COBIT secara penuh. Implementasinya hanya pada sebagian proses, tidak menyeluruh. Artinya, mereka mengaku menggunakan COBIT 5 tapi hanya merab-raba permukaannya. Ini bukan implementasi, ini simulasi.

Kita perlu bertanya lebih keras: apakah universitas membutuhkan COBIT 5, atau hanya butuh tata kelola TI yang sederhana, kontekstual, dan realistik?

COBIT mungkin cocok untuk korporasi multinasional dengan struktur hierarki jelas dan anggaran besar. Tapi untuk institusi yang masih bingung membedakan server dengan storage, ini adalah ilusi kemajuan.

Referensi:

- Edirisinghe Vincent, N., & Pinsker, R. (2020). IT risk management: Interrelationships based on strategy implementation. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(3), 553–575. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2019-0093>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/68206ab3ed64151e497727a2/cobit-5-di-kampus-mimpi-indah-tata-kelola-it-yang-terlalu-muluk>

Green IT: Sekedar Label atau Jalan Menuju Masa Depan?

11 Mei 2025, 02:27



Artikel "*Governance and Management of Green IT: A Multi-Case Study*" terlihat seperti upaya akademis yang mulia mendesain *framework* GMGIT 2.0 sebagai panduan untuk organisasi menjalankan praktik TI yang ramah lingkungan. Ada audit, ada *maturity* model, ada *checklist*. Lengkap, rapi, dan tampaknya siap digunakan. Tapi persoalannya bukan di *framework*. Masalahnya: siapa yang benar-benar peduli?

Mayoritas organisasi masih sibuk mengejar efisiensi dan profit jangka pendek. Server masih menyala 24 jam, pembelian perangkat tak memperhitungkan siklus hidup karbon, dan "mematikan komputer di malam hari" sudah dianggap tindakan lingkungan yang heroik. Ironi terbesar? Salah satu organisasi peserta studi pusat keamanan siber berskala Eropa ternyata berada di *maturity* level 0. Nol. Sama sekali belum siap, meskipun ikut proyek ini.

Framework GMGIT memang dibuat untuk menambal lubang besar: tidak adanya standar internasional yang benar-benar fokus pada *Green IT*. Ia berbasis pada COBIT, namun ditambah aspek-aspek keberlanjutan. Tapi tanpa tekanan dari regulator, pelanggan, atau

investor, kebanyakan organisasi tidak akan repot-repot mengukur "berapa banyak CO₂ yang dikurangi" atau "berapa kilowatt listrik yang dihemat". Dan tanpa metrik, praktik *Green IT* hanya akan jadi proyek tempelan atau upaya kosmetik menjelang audit ISO.

Green IT terlalu sering dikerdilkan jadi strategi PR. Beli printer hemat energi, kurangi cetak dokumen, lalu pamerkan sebagai pencapaian besar dalam laporan keberlanjutan. Padahal isu ini seharusnya menyentuh lebih dalam: efisiensi pusat data, penggunaan energi terbarukan, hingga pengelolaan e-waste yang berkelanjutan. Sayangnya, artikel ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi tidak punya dokumen resmi, tidak punya strategi, bahkan tidak tahu bagaimana mengukur keberhasilan *Green IT* mereka.

Framework seperti GMGIT bisa sangat berguna. Tapi seperti manual mobil sport yang diberikan ke orang yang baru belajar menyetir, panduan secanggih apapun takkan berguna jika komitmen dasarnya belum ada. Terlebih jika tidak ada reward atau penalti yang nyata dari pasar.

Green IT harusnya jadi bagian dari budaya operasional organisasi, bukan sekadar jargon elitis. Tanpa kesadaran struktural dan dorongan sistemik, *Green IT* akan tetap menjadi "ornamen audit" ditunjukkan saat perlu, lalu dilupakan setelahnya.

Referensi:

Patón-Romero, J. D., Baldassarre, M. T., Rodríguez, M., Runeson, P., Höst, M., & Piattini, M. (2020). Governance and Management of Green IT: A Multi-Case Study. *Information and Software Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106414>

<https://www.kompasiana.com/arumpspita/6820fa34ed6415793935dd92/green-it-sekedar-label-atau-jalan-menuju-masa-depan>

Riwayat Hidup Penulis



Arum Puspita, lahir di Magetan pada 18 Mei 2009, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Masa pendidikan menengahnya dijalani di SMA Negeri 1 Maospati, mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Ketertarikannya pada dunia teknologi membawa Arum untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan mengambil jurusan Teknik Informatika. Saat ini, ia sedang menempuh semester enam dan terus memperdalam ilmu serta pengalaman di bidang teknologi.

Sejak awal, Arum memiliki minat yang mendalam pada pengembangan web, khususnya di bidang *frontend development*, desain UI/UX, dan inovasi digital. Baginya, pengembangan antarmuka bukan hanya soal keindahan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat mempermudah interaksi pengguna dan menciptakan pengalaman digital yang menyenangkan. Semangatnya untuk terus belajar dan mengeksplorasi dunia teknologi, terutama di bidang pengembangan web, menjadi pendorong utama dalam perjalanan akademik dan profesionalnya.

IT GOVERNANCE dan INOVASI DIGITAL

Pilar Modernisasi Organisasi



ARUM PUSPITA

Transformasi digital telah menjadi sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan era disrupsi teknologi. Organisasi dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi mutakhir, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dalam hal tata kelola Teknologi Informasi (TI). Buku ini mengupas secara mendalam bagaimana IT Governance dapat menjadi pilar utama dalam proses modernisasi organisasi, menjembatani antara strategi bisnis dan pengelolaan sistem informasi yang efektif.

Buku ini membahas konsep-konsep fundamental dalam tata kelola TI seperti perbedaan antara IT Governance dan IT Management, serta pentingnya peran kebijakan, struktur, dan proses dalam mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan teknologi di seluruh lini organisasi. Dengan menggunakan kerangka kerja internasional seperti COBIT, ITIL, dan ISO/IEC 38500, pembaca dibimbing untuk memahami standar praktik terbaik dalam pengelolaan TI yang selaras dengan tujuan organisasi.

Selain membahas kerangka teoretis, buku ini juga dilengkapi dengan kajian praktis dan studi kasus dari berbagai sektor yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat mengimplementasikan strategi digital secara efektif. Fokus diberikan pada manajemen risiko, pengendalian akses informasi, penjaminan kualitas sistem, dan integrasi TI dalam pengambilan keputusan strategis. Penulis juga menekankan peran penting Chief Information Officer (CIO) dalam menyelaraskan kebutuhan teknologi dan bisnis.

Tidak hanya berhenti pada aspek struktural dan teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi. Budaya yang kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis data menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia yang melek teknologi juga menjadi fokus pembahasan yang tak terpisahkan.

Buku ini merupakan referensi komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi TI, serta pemimpin organisasi yang ingin memahami peran strategis tata kelola TI dalam era digital. Dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan aplikatif, buku ini tidak hanya menambah wawasan pembaca, tetapi juga memberikan panduan nyata dalam merancang strategi transformasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.



LECTURA
Literasi Digital Masa Kini